

UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENGEMBANGKAN KAIN SONGKET SEBAGAI PRODUK UNGGULAN

Cintami Prima Dinantia
Rasyaathallah172120@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin M,Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -
Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

This study aims to determine Pekanbaru City Government's efforts in developing songket as a superior product. As for the background of this study is that the policy of development of songket not run well. Development of songket weaving has not led to the effort to preserve and popularize songket. Songket is only known in certain circles. This research applies the theory of the role of institutions, while the method used is the method of research with a qualitative approach. The data obtained with interviews and documentary data analysis to further analyzed by descriptive analysis method. This study shows that the development of Songket Weaving crafts made by the City of Pekanbaru has not gone well, walaupun all coaching programs have been implemented but the results "not optimal". Indeed, the coaching and development program has been carried out, but in the aspect of the creation of business climate, financing, guarantees and partnerships not run as expected both by businesses and by the government itself. While on the development aspects of the entrepreneurial spirit of the new government limited to conduct seminars and training that it is only a formality.

Keywords; Role of Government, Weaving Songket

I. PENDAHULUAN

Pengembangan identitas lokal itu diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pengembangan kain songket sebagai ciri khas pakaian masyarakat melayu. Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu dan Minangkabau di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi.

Benang logam metalik yang tertunen berlatar kain menimbulkan efek kilauan cemerlang itulah kain songket yang menjadi ciri khas di masyarakat Melayu Riau dan Pekanbaru khususnya.

Songket memiliki motif-motif tradisional yang sudah merupakan ciri khas budaya wilayah penghasil kerajinan ini. Jenis kerajinan tangan di Kota Pekanbaru yang menjadi ciri khas adalah seperti: Anyaman pandan, anyaman rotan, tudung saji, tikar, tempat lampu, tenun songket,

seni ukir, sulaman batik siak dan masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Namun biasanya tenunan songket merupakan tenunan yang paling banyak dicari orang, karena kain songket ini bisa digunakan dalam acara-acara resmi di daerah-daerah.

Ragam jenis kain songket yang biasa digunakan antara lain: songket motif bunga, motif awan, motif tunggal, motif daun tunggal, motif tabir bintang, motif mata panah, motif pucuk rebung, motif siku kaluang, dan motif kuntum bunga. Kain songket ini merupakan kain khas bumi melayu yang tetap harus dijaga kelestariannya. Kain songket umumnya banyak digunakan pada pakaian adat orang melayu. Kain tenun songket memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang menjadi nilai jual lebih dan menjadi salah satu jenis kerajinan tangan khas di Kota Pekanbaru yang kaya akan keindahan dan estetika sebagai wujud budaya Kota Pekanbaru yang melambangkan corak, pemikiran dan pandangan masyarakat melayu.

Kota Pekanbaru adalah salah satu tempat penghasil kain tenun songket yang cantik. Selipan benang emas dan perak yang membentuk pola pada kainnya. Tidak hanya untuk perempuan, kain songket pun dapat dikenakan pada sosok laki-laki. Corak yang cukup terkenal adalah Pucuk Rebung. Akan tetapi produktivitas dari para perajin semakin rendah. Hal ini dikarena peran serta dari pihak pemerintahan dalam memberikan bimbingan dan dorongan, seperti pembinaan atau pendidikan kewirausahaan serta pasar belum terlihat nyata. Selain itu, kain songket pada umumnya lebih dikenal dan dimiliki oleh masyarakat

ekonomi menengah keatas, jadi susah untuk memasarkan produk kain songket.

Selama ini kain songket hanya dikenal untuk pakaian, sementara apabila di gunakan untuk produk asesoris rumah tangga akan meningkatkan jumlah produksi dari songket itu sendiri. Terjalannya kerjasama yang berkesinambungan dengan organisasi/ pengusaha yang lain untuk dapat membantu memasarkan produk. Padahal pengembangan kain songket sebagai komoditas unggulan Kota Pekanbaru telah dijamin oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 yang di dalamnya termuat sasaran pokok RPJPD yakni “mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang berbudaya melayu” yang selanjutnya dijelaskan dalam indikator dan target RPJPD point ke (5) Aspek estetika budaya Melayu dalam arsitektur dan taman kota yang menjadi ciri khas Kota Pekanbaru dan membentuk karakter kota. Salah satu yang menjadi ciri khas Kota Pekanbaru adalah tenun songket yang bahkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dijadikan monumen daerah dengan membangun tugu songket sebagai salah satu sarana pengenalan songket sebagai produk unggulan daerah dan ciri khas daerah.

Pengembangan kain songket pada dasarnya adalah sebagai salah satu upaya dalam merevitalisasi budaya Melayu yang menjadi tujuan jangka panjang Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri dalam pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan

budaya melayu (termasuk kain songket) dengan menggunakan strategi “Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal”. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan pada;

1. Penguatan penggunaan simbol-simbol budaya Melayu
2. Memfasilitasi penyelenggaraan seni dan even-even kebudayaan lokal
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelestarian budaya Melayu.

Selain itu, pengembangan budaya lokal dalam hal ini kain songket sebagai salah satu ciri khas Kota Pekanbaru juga di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. Berpijak pada payung hukum tersebut sejatinya tidak ada alasan bahwa pengembangan kain songket sebagai komoditas unggulan daerah serta ciri khas daerah tidak berjalan. Namun kondisi saat ini berbanding terbalik, popularitas kain songket mulai redup seiring dengan minimnya promosi dari pemerintah serta ketiadaan aturan yang mengikat.

Dalam upaya pengembangan kain songket sebagai produk unggulan Kota Pekanbaru pada masa pemerintahan H. Herman Abdullah, Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), pengembangan kain songket sempat menjadi primadona bahkan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan kain songket sebagai ikon kota dengan membuat tugu songket. Akan tetapi pasca

perubahan tampuk kekuasaan di Pemerintah Kota Pekanbaru, upaya pengembangan kain songket tampak stagnan bahkan cenderung popularitas kain songket semakin meredup.

Terkait dengan hal di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Pengembangan kain songket sebagai komoditas unggulan belum mengarah pada pembentukan kebijakan daerah sehingga belum ada arah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara nyata.
2. Pengembangan kain songket sebagai komoditas unggulan belum berwujud nyata seperti belum adanya sentra produksi, perlindungan pasar maupun kegiatan lain yang sifatnya mendukung pengembangan kain songket sebagai komoditas unggulan.
3. Belum adanya ketersediaan bahan baku yang cukup untuk produksi dalam bentuk pakaian jadi, sehingga kondisi ini membuat kain songket tidak menjadi pilihan utama.
4. Belum adanya proteksi terhadap kain songket di pasar-pasar dan karena keterbatasan bahan baku serta produksi membuat kain songket cenderung lebih mahal sehingga pangsa pasarnya juga terbatas pada kalangan tertentu saja.
5. Pengenalan kain songket belum dilakukan secara terencana, terstruktur dan masif. Seharusnya pengenalan kain songket sudah dilakukan sejak dini mulai dari Sekolah Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi, serta seharusnya

pemerintah membuat kebijakan penggunaan kain songket pada semua bidang usaha terutama yang berkenaan dengan pelayanan publik, perbankan, dan industri jasa lainnya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pengembangan kain songket ini dalam studi yang berjudul; **“UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENGEMBANGKAN KAIN SONGKET SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH”**.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah; Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan kain songket sebagai produk unggulan daerah?

III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan kain songket sebagai komoditas sandang unggulan daerah.

B. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis pengembangan songket sebagai komoditas unggulan daerah maupun produk lainnya yang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan Daerah. Secara akademis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan dalam penelitian sejenis.

IV. TINJAUAN TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Anderson, kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.¹ Batasan lain yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye bahwa *“public policy is whatever government choose to do or not to do”*.² Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.³

Definisi lain tentang kebijakan publik seperti yang diungkapkan oleh H. Hugh Hecl, bahwa:

“policy is a course of action intended to accomplish some end. A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or actions, and such a course has to be perceived and indentified by the analyst in question

“Kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan). Suatu kebijakan akan lebih cocok dilihatnya sebagai suatu arah

¹ Anderson (dalam Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta, hal. 14)

² Thomas R Dye, 1972. *Understanding Public Policy*, Englewood, Cliffs, New Jersey Prentice Hall, Inc. (dalam *Ibid.*, hal. 15)

³ Richard Rose (dalam *Loc Cit.*, hal 17)

tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, daripada sebagai sekedar suatu keputusan atau tindakan belaka”.⁴

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kajian publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori. *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan *kedua*, berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.⁵

Peran Institusi

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁶ Analisis

⁴ H. Hugh Hecllo (dalam Soenarko, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Papyrus: Surabaya, hal. 16)

⁵ Amir Santoso (dalam *Ibid.*, hal 17)

⁶ Sarjono Soekanto. 1984. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Rajawali: Jakarta, hal 237

terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Ketentuan peranan
- b. Gambaran peranan
- c. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukanto (1984) bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.⁷

V. METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data

⁷ *Ibid.*,

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁸

5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan lokus pada upaya pengembangan tenun songket sebagai produk unggulan daerah.

5.2. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik atau cirri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik pengambilan informan ini kemudian berkembang dengan menggunakan *snowball* (bola salju) dengan maksud agar hasil penelitian dapat diperoleh secara komprehensif dan mendalam. Untuk itu dibutuhkan *key person* atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian. Adapun informan kunci penelitian ini antara lain;

- 1) Unsur Dinas Koperasi-UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan pihak terkait.
- 2) Penenun Songket 2 orang
- 3) Pengamat kebijakan 1 orang
- 4) Unsur Masyarakat 2 orang

5.3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut yang menyangkut kriteria-kriteria untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak kedua, data tersebut telah diolah oleh pihak yang berwenang. Data tersebut berasal dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun data sekunder berupa laporan-laporan risalah rapat anggaran, ketetapan pansus, nota APBD, dokumen-dokumen media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab terhadap informan guna memperoleh data dan informasi mengenai kebijakan pengembangan tenun songket sebagai komoditi unggulan Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai kebijakan pengembangan tenun songket sebagai komoditi unggulan Provinsi Riau.

c. Dokumentasi

Yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter terkait dengan kebijakan

⁸ Emmy Susanti Hendrarso. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Prenada Media: Jakarta.

pengembangan tenun songket sebagai komoditi unggulan Kota Pekanbaru.

5.5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).⁹

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan

Kampar), Negeri Senapean berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :¹⁰

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat

⁹BPS. 2012. Pekanbaru Dalam Angka. BPS: Pekanbaru

¹⁰ Baca selengkapnya dalam sejarah Kota Pekanbaru sumber BPS Pekanbaru atau di <http://wikipedia.online>

Pekanbaru untuk membangun kotanya.

B. Perkembangan Tenun Songket Melayu

Tenun Songket Melayu Siak atau songket Melayu Riau merupakan kekayaan asli negeri Melayu Siak, songket Melayu ini amatlah kaya dengan motif, warna, dan makna simbol. Makna simbol yang terdapat pada setiap motif kebudayaan Melayu Siak adalah makna ketaqwaan kepada Allah, kerukunan, kearifan, kepahlawanan, kasih sayang, kesuburan, tahu diri, dan tanggung jawab. Seorang pengguna kain songket tidak hanya sekedar memakai sebagai busana hiasan tetapi juga untuk memahami simbol-simbol yang terdapat pada motif yang menghiasi setiap bagian dari kain songket yang dapat dijadikan panutan dan diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar dalam menjalani kehidupan membawa kedamaian bermasyarakat dan berbangsa. Kerajinan Songket Melayu menampilkan beragam motif, yang mengandung makna. Motif-motif yang lazimnya di angkat dari tumbuh-tumbuhan atau hewan (sebagian kecil) di kekalkan menjadi variasi-variasi yang sarat dengan makna-makna yang mencerminkan ajaran tentang asas kepercayaan dan budaya Melayu.

Dahulu setiap, tokoh adat, orang tua kebudayaan Melayu, masyarakat dan pengrajin diharuskan untuk memahami, bentuk motif, warna, makna simbol yang terdapat pada kain songket Melayu Siak. Keharusan itu dimaksudkan agar mereka pribadi mampu memahami makna yang terdapat pada setiap, dan mampu pula menempatkan motif sesuai menurut pakam (aturan) yang

telah ada sejak zamana kerajaan Sultan Sahyid Ali.

Sejauh ini, usaha pemerintah untuk mengembangkan dan melestarikan kain songket dikalangan masyarakat adalah membuat peraturan bahwas setiap hari jum'at PNS, BUMN, Sekolah TK- SMA, dan dilingkupan pemerintah kota maupun pedesaan diwajibkan menggunakan baju Cekak Musang dengan menggunakan kain sampin kain songket bagi laki-laki, sedangkan untuk wanita menggunakan baju muslim dengan pasangan rok menggunakan kain songket. Seiring perkembangan zaman makna yang terdapat pada setiap motif yang ditunen pada kain songket sudah tidak dipahami oleh masyarakat dan generasi muda, dikarenakan ketidakpedulian untuk mempelajari dan memahami makna yang terdapat pada setiap motif. Adapun resolusi dari nenek moyang mereka adalah mengharapakan generasi kebudayaan Melayu tetap menjunjung tinggi ajaran tentang asas kepercayaan kebudayaan Melayu yang mencerminkan ajaran ketaqwaan kepada Allah, kerukunan, kearifan, kepahlawanan, kasih sayang, kesuburan, tahu diri, dan tanggung jawab. Sebagai cerminan kepribadian untuk menuju kehidupan yang lebih baik, membawa kedamaian dalam bermasyarakat dan berbangsa. Kebanyakan masyarakat kebudayaan Melayu lebih mengutamakan keindahan dari tenunan kain songket dari pada memahami falsafah yang disampaikan pada setiap motif yang terdapat pada bagian-bagian kain songket yang mereka gunakan. Sangat disayangkan jika makna yang terdapat pada setiap motif pelan-

pelan memudar dari kehidupan masyarakat melayu dikarenakan ketidak perdulian mereka untuk mempelajari dan memahami makna motif, warna, dan makna simbol. Pada saat ini perajin lebih mengutamakan keindahan tenunan songket, karena mereka lebih mengutamakan selera pasar dari pada mengutamakan aturan dan penempatan motif pada kain songket.

Sehingga kain songket yang ditenun oleh para perajin hanya sebagai hiasan dalam berpenampilan, dikarenakan para perajin dalam pembuatan kain songket pada masa ini tidak lagi menggunakan kepala kain, tepi atas, dan kaki atas kain dan perajin lebih banyak memproduksi kain songket Lejo (banyak warna) yang menurut tokoh adat setempat kain songket Lejo tidak memiliki makna khusus selain sebagai hiasan dalam berpenampilan. Perajin sudah keliru dan tidak mengetahui aturan dalam penempatan motif pada kain songket. Dimana setiap kain songket terbagi menjadi 4 bagian yaitu, adanya badan kain, kaki kain, tepi kain dan kepala kain, dimana kepala kain ini adalah gabungan dari ketiga bagian tersebut yang memiliki motif dan motif-motif tersebut disatukan dan menjadi kepala motif yang berada ditengah-tengah kain songket. Akan tetapi sekarang perajin sangat enggan sekali membuat kain songket dengan aturan yang telah ada sejak dahulu, dikarenakan mereka menghemat biaya agar lebih irit. Dengan cara seperti ini para perajin akan merusak aturan dalam pembuatan kain songket dan aturan dalam menempatkan motif. Hanya beberapa masyarakat seperti tokoh adat, orang tua-tua Melayu yang disegani, dan Pengrajin tenun kain

songket yang masih memahami dan tetap mengikuti aturan-aturan penempatan motif dalam pembuatan kain songket Melayu Siak.

Kain tenun songket di Riau yang sekarang banyak dijumpai merupakan kain tenun tradisional turunan dari daerah siak. Kain tenun di Riau sendiri merupakan budaya yang awalnya diperkenalkan oleh suku Melayu dari Trengganu, Malaysia. Masyarakat Riau mulai mengenal kain tenun sejak masa pemerintahan Kerajaan Siak. Ibukota kerajaan Siak masih terletak di Siak, atau sekarang dikenal dengan nama Siak Sri Indrapura. Pada masa pemerintahan Sultan Sayid Ali, hubungan antar Kerajaan Siak dengan kerajaan di Semenanjung Melayu sangatlah erat. Masyarakat Siak belajar menenun dari perajin tenun bernama Wan Siti binti Wan Karim yang sengaja didatangkan dari Kerajaan Trengganu, Malaysia.

Pada waktu itu alat tenun yang digunakan berupa alat tenun sederhana dari bahan kayu yang berukuran sekitar 1 x 2 meter. Disebut 'kik'. Sesuai dengan ukuran alatnya, maka lebar kain yang dihasilkan tidak terlalu besar, sehingga tidak cukup untuk digunakan membuat satu kain sarung. Untuk membuat satu kain sarung harus menyambung dua kain yang telah jadi, proses ini disebut 'Berkampung'.

Pada masa tersebut Siak bisa dikatakan sebagai sentra tenun yang khusus menyediakan kain bagi pakaian para bangsawan di kerajaan. Namun, setelah itu pusat pemerintahan mulai dipindahkan ke daerah tepian sungai yang kemudian dikenal sebagai Pekanbaru. Perpindahan pusat pemerintahan ke

Pekanbaru, otomatis semua perangkat negeri dan pusat kebudayaan pun berpindah. Seiring waktu, kesenian dan kebudayaan Melayu mulai berkembang, termasuk kerajinan tenun tradisionalnya. Bermula dari sinilah Tenun Siak mulai berkembang dan dinamai dengan Tenun Melayu Pekanbaru.

Berkembangnya tenun tradisional Riau tidak lepas dari peranan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh wanita Melayu Riau yang sangat berperan dalam mengembangkan kerajinan kain tenun Siak di Riau adalah Tengku Maharatu, permaisuri Sultan Syarif Kasim II. Beliau mengajarkan cara bertenun kepada kaum wanita di Siak dengan tujuan meningkatkan derajat wanita melalui penambahan keterampilan bertenun tersebut.

Nama Tenun Songket Melayu Pekanbaru digagas oleh Hj Evi Meiroza Herman yang bergelar "Puan Gemilang Songket Negeri" [5]. Apresiasi dan prestasi beliau mendapat penghargaan khusus dari Museum Rekor Indonesia (MURI). MURI menilai tenun songket Melayu memberikan inspirasi dan motivasi pada kaum perempuan. Beberapa penghargaan telah diraih beliau, mulai dari penghargaan MURI untuk Songket Terpanjang di Indonesia pada tahun 2005.

Selanjutnya pada tahun 2008, MURI kembali memberikan penghargaan dengan panjang songket 45 meter. Pada akhir 2009, beliau mendapat Penghargaan Upakarti Jasa Pengabdian dari Kementerian Kebudayaan Indonesia.

Kain tradisional daerah Riau merupakan kain tenun, atau biasa disebut oleh perajin dan pendatang sebagai kain songket. Tenun

tradisional Riau pada masa dahulu hanya digunakan untuk kalangan bangsawan atau kaum kerajaan saja. Namun seiring waktu, kain tenun ini mulai digunakan secara luas. Paling lazim kain tenun tradisional digunakan untuk acara pernikahan adat Riau sebagai bahan utama pembuat pakaian pengantin, dan juga sebagai salah satu hadiah pernikahan (seserahan) untuk mempelai. Selain itu, mulai banyak produk kerajinan yang dibuat dari tenun khas Riau. Untuk cinderamata misalnya, dibuat souvenir gantungan kunci berbentuk pakaian adat Riau dengan aksent tenun. Ada pula wadah tisu, sarung bantal, kap lampu, tempat perhiasan, tas, dan lain-lain.

C. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Kerajinan Tenun Songket Sebagai Produk Unggulan Daerah

Untuk mengetahui upaya pengembangan kerajinan Tenun Songket yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penelitian ini, maka penulis akan menganalisis pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada usaha kecil kerajinan Tenun Songket dengan analisis sebagai berikut:

C.1. Penciptaan Iklim Usaha

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan menyangkut aspek-aspek persaingan, prasarana, informasi, perizinan usaha dan perlindungan. Dunia usaha dan masyarakat diajak berperan secara aktif menumbuhkan iklim usaha tersebut. Dalam upaya meningkatkan

ekonomi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangundangan yaitu UU RI. No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengakui telah menjalankan UU RI. No 20 tahun 2008 BAB V Pasal 7 tentang Penumbuhan iklim usaha salah satu contohnya adalah dengan cara mempermudah proses pembukaan izin usaha dan juga memberikan rekomendasi agar pengusaha dapat meminjam modal di bank. Izin usaha sangatlah penting agar usaha yang dikelola sah dan mendapat jaminan keamanan selama melaksanakan usaha. Selain itu dengan mengurus surat izin usaha artinya perusahaan telah menjalankan peraturan pemerintah dengan tertib. Namun demikian ternyata dari 37 usaha kecil Tenun Songket yang terdapat di Kota Pekanbaru tidak semuanya telah mendaftarkan usahanya dan memiliki izin usaha. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam kutipan wawancara berikut;

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai instruksi Walikota telah menetapkan rencana strategis dalam upaya pengembangan tenun songket. Walikota juga menginstruksikan untuk melakukan pendataan usaha kerajinan tenun songket mengingat kondisi penenun yang saat ini hampir sulit ditemui. Walaupun demikian tidak semua usaha kerajinan tenun songket dapat kami data selain karena kurangnya kerjasama dari pemilik usaha juga

jenis usaha rumahan membuat kerajinan songket sulit untuk didata dan diberikan pembinaan.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan penenun songket Winda di Jl. Kartama Pekanbaru terungkap bahwa kerajinan tenun songket saat ini dihadapkan pada berbagai masalah terutama masalah pasar. Popularitas tenun songket kalah jauh dibandingkan jenis kain yang lain, selain itu pemakaian tenun songket hanya pada kalangan tertentu. Berikut kutipan wawancara dengan Hj. Winda Pengusaha Tenun Songket;

“kegelisahan para pengusaha tenun songket adalah pada terbatasnya pasar dan bantuan usaha. Banyak sahabat perajin tenun yang sudah gulung tikar karena susahnya bahan baku dan akses pasar serta modal usaha. Selain itu, kita juga dihadapkan pada persoalan promosi dan harga. Kami akui bahwa harga tenun songket sedikit lebih mahal dibandingkan jenis kain yang lain oleh karena itu tidak semua kalangan mau membeli dan menggunakan kain songket. Walaupun demikian kami tetap mengapresiasi usaha pemerintah dengan melakukan pendataan dan pembinaan terhadap para perajin songket”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah dalam konteks penciptaan iklim usaha sudah melakukan pendataan dan pembinaan. Pendataan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan akses modal dan bantuan lainnya. Demikian menurut Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menanggapi pertanyaan untuk Dinas Perindag mengembangkan iklim usaha tenun songket itu.

Selain itu, menurut Hj. Evi Meiroza Herman dalam kutipan wawancara di media mengungkapkan bahwa pengembangan tenun songket pada masa Pemerintahan Walikota Herman Abdullah sangat serius bahkan menjadi ikon kota. Sehingga saat itu para perajin songket sangat bersemangat dalam usaha mengembangkan usaha tenun songketnya (dikutip dari <http://www.museumsongketdigital.com/site/riau/sejarah-songket>).

Sementara itu dalam wawancara dengan pelaku usaha Raja Adri terungkap bahwa tenun songket merupakan salah satu khazanah budaya melayu yang harus dilestarikan. Tenun pada awalnya hanya digunakan untuk acara-acara tertentu saja seperti acara adat. Namun dalam masa perkembangannya Tenun mulai digunakan oleh berbagai kalangan, hal ini menyebabkan Tenun mulai bermasyarakat dan dibuat dengan berbagai modifikasi namun tidak meninggalkan ciri khasnya. Semakin banyaknya permintaan terhadap kain tenun, maka upaya-upaya para pengrajin untuk menampilkan karya-karya tenunan semakin maju. Dengan menggeliatnya sektor-sektor pariwisata di Pekanbaru menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap hasil-hasil kerajinan khas Melayu termasuk Tenun yang merupakan ciri khas budaya Melayu.

Namun Harga Tenun Riau yang relatif mahal menjadi faktor

kurangnya minat masyarakat terhadap Tenun dan Batik Riau. Selain disebabkan harga yang relative mahal, Tenun kurang begitu dikenal secara Nasional, apalagi ke manca negara, hal ini disebabkan kurangnya promosi Tenun siak keluar daerah. Kurangnya pemasaran membuat Tenun tidak terlalu dikenal oleh sebagian besar turis domestik dan mancanegara. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pemilik UKM yang ada di Pekanbaru, namun secara tidak langsung juga membuat mata pencaharian masyarakat yang ada di Provinsi Riau terutama yang berada di Daerah penghasil kerajinan Tenun Songket menjadi berkurang.

Sementara itu mengutip dari pemberitaan media massa diketahui bahwa Walikota Pekanbaru Firdaus MT mengatakan Pekanbaru akan jadi pintu gerbang masuknya barang dari luar negeri maka pengusaha lokal harus meningkatkan kualitas produknya agar tidak kalah dengan produk luar negeri.

"Kami mendorong pengusaha lokal untuk memproduksi barang yang berkualitas, murah dan efisien salah satunya dengan berbagai pelatihan," katanya, Senin (21/4/2014).

Produsen barang lokal diajarkan cara menekan biaya produksi dengan tidak menurunkan kualitas, mencontoh apa yang dilakukan China membangun dunia industri. Firdaus optimistis produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri jika dikelola dengan serius dan memperhatikan permintaan pasar. Firdaus mencontohkan produksi hortikultura dari Pekanbaru dengan peningkatan

kualitas saat ini mampu memenuhi kebutuhan ekspor ke Singapura.

Upaya mendorong perkembangan produk lokal juga dilakukan dengan memudahkan pengusaha memperoleh sertifikat SNI, semua pengurusan digratiskan. Pelaku usaha juga didorong mematenkan produknya agar kekayaan intelektualnya diakui. Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru El Syabrina mengatakan masyarakat didorong agar mencintai produk lokal bahkan PNS diharuskan memakai produk lokal.

“Setiap hari Kamis, PNS kamiwajibkan pakai baju dari songket tenun produk Pekanbaru sebagai salah satu cara mempopulerkan produk lokal”. Syabrina mengatakan modifikasi dalam mengembangkan produk lokal perlu dilakukan” Seperti songket tenun Pekanbaru dulunya hanya kain yang dijalin dengan benang emas, kini sudah digunakan sebagai bahan baju dengan modifikasi corak lebih ringan. Cara itu ternyata efektif meningkatkan permintaan pasar, terbukti saat ini songket tenun Pekanbaru dicari oleh pendatang untuk oleh-oleh sebab tidak ada di daerah lain. Perlindungan terhadap konsumen tidak luput dari perhatian, saat ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sudah didirikan di Pekanbaru untuk memastikan pelanggan mendapatkan haknya atas produk yang dibeli.

C.2. Pembinaan dan Pengembangan

Dalam satu tahun, pembinaan terhadap usaha kecil Tenun Songket yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan 1-2 kali bahkan tidak sama sekali. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan berupa mengadakan pembinaan dan penyuluhan mengenai usaha kecil Kerajinan Tenun Songket yang dilakukan oleh Pegawai Penyuluh (Jabatan Fungsional) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedangkan pelatihan para pelaku usaha kecil kerajinan Tenun Songket di Kota Pekanbaru diambil beberapa pengusaha untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan.

Dengan adanya pembinaan-pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan para pengusaha usaha kecil kerajinan Tenun Songket yang ada di Kota Pekanbaru bisa memahami dan mengembangkan usahanya. Diharapkan dengan adanya pembinaan usaha kecil kerajinan Tenun Songket nantinya usaha mereka akan menjadi usaha dengan skala yang besar. Tujuan diadakannya pembinaan dan pelatihan adalah supaya masyarakat pelaku usaha kecil kerajinan Tenun Songket yang ada di Kota Pekanbaru bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari pembinaan tersebut.

Namun untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan tersebut, terkadang masyarakat pelaku usaha tidak mengetahui informasinya karena informasi yang di dapat lambat dan tidak ada kejelasan datangnya informasi, hal ini karena adanya tebang pilih dalam mengikut

sertakan pelaku usaha kecil kerajinan Tenun Songket dan faktor lain dalam akses menuju tempat usaha kecil kerajinan Tenun Songket jauh dari kota. Namun selama diadakan pembinaan dan pelatihan tersebut peserta pembinaan usaha kecil kerajinan Tenun Songket di Kota Pekanbaru terkadang tidak bisa mengerti, atau sulit untuk memahami karena sumber daya manusia yang masih lemah dan kurang memahami serta hanya sebatas mencari pengalaman. Hal itu terungkap dari wawancara dengan perajin tenun songket Hj. Zainab di Jalan Riau I dalam kutipan wawancara berikut;

“kami jarang mendapatkan informasi mengenai adanya pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Bisa jadi pemerintah hanya memprioritaskan kelompok usaha yang telah ada sebelumnya, karena kami ini sifatnya usaha rumahan dan jarang berhubungan dengan pemerintah barangkali karena hal itu kami tidak dilibatkan dalam pembinaan dan pelatihan”

Sementara itu dalam kesempatan wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terungkap bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan intens melakukan pembinaan dan pelatihan. Adapun pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yaitu :

a. Pelatihan dalam bentuk Manajemen Dalam memberikan pembinaan dan pelatihan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan dan

pembinaan kepada usaha kecil kerajinan Tenun Songket dalam bentuk manajemen. Pembinaan yang dilakukan terhadap usaha kecil kerajinan Tenun Songket dalam bentuk manajemen yang baik sesuai dengan standar operasional kerja dan juga memberikan fasilitas kemudahan produksi dan cara memproduksi bagi usaha kecil kerajinan Tenun Songket yang mana dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha kecil kerajinan Tenun Songket. 1) Manajemen Achievmen Motivation Training (AMT). Dalam melakukan pembinaan terhadap usaha kecil kerajinan Tenun Songket perlu diadakan pembinaan dengan melakukan motivasi kepada industri yang mana pembinaan dilakukan dengan melatih dasar manajemen yang baik dalam melakukan dan menjalankan industri. 2) Pembinaan / pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama). Pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.

b. Pembinaan secara teknis Memberi bantuan peralatan/ mesin. Dalam pembinaan teknis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan tentang teknologi industri. Setelah para peserta pembinaan usaha kecil kerajinan Tenun Songket di didik, dilatih serta di berikan pengetahuan dan keterampilan

maka selanjutnya akan di berikan bantuan peralatan dan atau mesin. Yang mana pada tahun 2013 anggaran yang diberikan pemerintah berjumlah Rp. 350 juta yang ditujukan kepada industri tekstil/ pakaian jadi sebanyak 37 IKM diantaranya CV. Pucuk Pakis dan Usaha Dayang Daepa. Tidak semua peserta pembinaan usaha kecil kerajinan Tenun Songket mendapatkan bantuan peralatan/ mesin, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

C.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan berupa alokasi dana yang dipersiapkan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha kecil kerajinan Tenun Songket. Dalam pembiayaan ini usaha kecil kerajinan tenun Songket harus diberikan bimbingan dan monitoring secara intensif dan berkelanjutan. pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak memberikan bantuan dana apapun kepada pengusaha kecil. Hal ini dikarenakan tidak adanya mata anggaran dalam alokasi dana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Kota Pekanbaru dalam kutipan wawancara berikut;

“tidak ada alokasi anggaran untuk bantuan usaha kerajinan tenun

songket. Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih mengarahkan pada bantuan peralatan usaha seperti mesin dan sejenisnya. Tentu selain karena tidak ada dasar hukumnya, keterbatasan anggaran pada Dinas juga menjadi penyebab mengapa tidak ada bantuan dalam bentuk uang tunai untuk perajin tenun songket”.

Sementara itu dalam wawancara penelitian dengan pihak Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pekanbaru diketahui bahwa bantuan untuk usaha kerajinan unggulan lokal sifatnya lebih spesifik. Dekranasda menjadi tempat untuk promosi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kerajinan tenun songket di Kota Pekanbaru.

C.4. Penjaminan

Kegiatan ini berupa pemberian jaminan sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya. Namun pada sisi lain usaha kecil kerajinan Tenun Songket juga harus ada kemauan untuk menggunakan dana modal sendiri dari pinjaman tersebut secara efisien, tepat dan keseriusan untuk pengembalian pinjaman tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan bantuan jaminan berupa surat rekomendasi kepada pihak ketiga yang akan membantu usaha kecil tenun songket, misalnya bank untuk mendapatkan modal. Ini jelas membantu pihak usaha tenun songket untuk mendapatkan bantuan oleh pihak bank dan pihak bank pun mendapat kepercayaan lebih supaya bantuan yang diberikannya dapat kembali.

Menurut Hj. Winda penjaminan pembiayaan dalam rangka memperkuat modal mestinya dilakukan oleh Pemerintah, kalau penjaminan hanya dilakukan oleh perajin maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh Pemerintah terlebih dengan kondisi perekonomian yang semakin lesu seperti sekarang ini. Berikut kutipan wawancara dengan Hj. Winda pelaku usaha tenun songket;

“penjaminan untuk modal usaha mestinya datang dari pemerintah, kalau kami yang meminjam ya sama saja. Harusnya pemerintah memberikan kemudahan akses entah dalam bentuk KUR atau apalah namanya yang tidak terlalu membebani pelaku usaha kecil menengah ini”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada penjaminan dari pemerintah terhadap pembiayaan atau penambahan modal usaha sehingga pelaku usaha merasa bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu pada aspek penjaminan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak berperan dalam usaha mengembangkan tenun songket sebagai produk unggulan daerah.

C.5. Kemitraan

Keberhasilan upaya pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik ditentukan oleh banyak faktor, yakni: (1) kemitraan yang menekankan pada *coproduction* dan *coprovision* hanya akan bisa berjalan efektif kalau diikuti oleh perubahan sikap dan orientasi pejabat birokrasi pemerintah; (2) pemerintah perlu terus mengembangkan dan

memberikan fasilitas untuk pengembangan sektor swasta; (3) pemerintah perlu mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan operasional pelayanan publik kalau sektor swasta-organisasi voluntir dan perusahaan bisnis sudah bisa melakukannya; (4) pengalihan peran pemerintah kepada swasta hendaknya dilakukan secara transparan dan terbuka; dan (5) pemberian kekuasaan yang besar kepada sektor swasta perlu diikuti oleh perbaikan efektivitas kontrol birokratik dan politik.

Dalam Modul II, Pembekalan Teknis Manajemen Strategik dan Teknik Penganggaran/Keuangan (2000 : 16-17) dijelaskan bahwa syarat dasar bagi kemitraan adalah adanya prinsip saling menguntungkan (*win-win solutions* atau *positive sum game*). Konsep kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dikenal juga sebagai kebijakan privatisasi/swastanisasi. Sedangkan kemitraan menurut Ramelen (1997 : 26) adalah pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian infrastruktur. Bidang pelayanan publik yang umum dikelola dengan prinsip kemitraan ini adalah pembangunan proyek infrastruktur, yang mencakup pembangunan proyek-proyek di bidang energi, jalan raya, pengelolaan sampah, air minum, fasilitas pasar, dan kegiatan infrastruktur lainnya.

Di Indonesia pola kemitraan yang paling sering dikembangkan adalah *Concession* atau Konsesi. Konsesi menurut Barton (Nurmandi,

1999 : 209) didefinisikan sebagai suatu persetujuan antara pemerintah dengan pihak swasta, di mana pemerintah memberikan suatu aset (berupa tanah atau jenis lain) kepadanya dalam suatu periode tertentu sesuai dengan masa kontrak dan mengembalikan kepada pemerintah setelah masa kontraknya selesai.

Kegiatan kemitraan dalam konteks ini berupa kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kerja sama lain yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan menyelenggarakan bazar di department store atau pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Pekanbaru, salah satunya yang sedang berjalan adalah pada department Store Central didekat pasar Kodim, Jalan Ahmad Yani. Jika kita masuk kedalam pusat perbelanjaan tersebut melalui pintu utama, maka pemandangan pertama yang akan kita lihat adalah jejeran mejameja dengan aneka pernik-khas riau termasuk juga disana ada makanan.

C.6. Pengembangan Semangat Kewirausahaan

Dalam pengembangan kemampuan kewirausahaan dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan oleh instansi terkait dan praktek magang di perusahaan kecil yang telah berkembang terutama di sentra-sentra kecil lokal maupun yang berskala nasional. Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah:

- a) Manajemen Good Manufacturing Practices (GMP) yaitu cara berproduksi yang baik dan benar. Dengan melalui tahap-tahap yang telah di atur dan di rencanakan maka tercapailah cara berproduksi yang baik dan benar.
- b) Manajemen Achievmen Motivation Training (AMT). Dalam melakukan pembinaan terhadap usaha kecil kerajinan Tenun Songket perlu diadakan pembinaan dengan melakukan motivasi kepada industri yang mana pembinaan dilakukan dengan melatih dasar manajemen yang baik dalam melakukan dan menjalankan industri.
- c) Pembinaan / pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama). Pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.

D. Kendala-Kendala Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Kain Songket Sebagai Produk Unggulan Daerah

1. Kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah Permodalan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan usaha kecil Kerajinan Tenun Songket dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk mengembangkan unit usaha.

Karena kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah, sehingga menyebabkan tidak semua program pembinaan dan pelatihan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlaksana.

2. Keterbatasan jumlah pegawai penyuluh (fungsional di Dinas Perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki tenaga penyuluh (Fungsional) yang jumlahnya sangat terbatas karena banyaknya pegawai yang sudah pensiun atau di mutasi (pindah tugas) ke dinas lain sehingga menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap industri kecil menengah khususnya usaha kecil kerajinan tenun Songket belum optimal dengan pertumbuhan industri kecil menengah yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi, salah satu faktor penyebab pembinaan usaha kecil Kerajinan Tenun Songket belum optimal adalah keterbatasan pegawai penyuluh (Fungsional) yang menyebabkan tidak semua program pembinaan berjalan sesuai dengan rencana
3. Terbatasnya sarana dan prasarana Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam melakukan pembinaan usaha kecil kerajinan Tenun Songket. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak cepat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Sarana yang dibangun pemerintah

tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pemilik kecil Kerajinan Tenun Songket. Contohnya bangunan yang dibangun oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu sentra usaha yang diciptakan untuk para industri di jalan Raya Pekanbaru Bangkinang untuk memasarkan hasil karya mereka, tidak di gunakan oleh para pelaku industri, juga termasuk usaha kecil kerajinan Tenun Songket, karena letaknya yang tidak strategis, jauh dari kota, jarang ada masyarakat yang berbelanja disana dan menyebabkan bangunan itu ini tidak dapat di fungsikan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan kegiatan yang sangat penting dalam membangun perekonomian di Kota Pekanbaru. yang mana usaha kecil dan usaha kecil menengah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Pekanbaru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru.

VII. PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan kerajinan Tenun Songket yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, walaupun semua program pembinaan sudah dilaksanakan namun hasilnya “belum optimal”. Memang pada program pembinaan dan pengembangan sudah dilakukan namun pada aspek penciptaan iklim

usaha, pembiayaan, penjaminan dan kemitraan belum berjalan seperti yang diharapkan baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah itu sendiri. Sedangkan pada aspek pengembangan semangat kewirausahaan pemerintah baru sebatas melakukan seminar dan pelatihan yang sifatnya hanya formalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson (dalam Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta

Emmy Susanti Hendrarso. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Prenada Media: Jakarta

Sarjono Soekanto. 1984. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Rajawali: Jakarta

Thomas R Dye, 1972. *Understanding Public Policy*, Englewood, Cliffs, New Jersey Prentice Hall, Inc